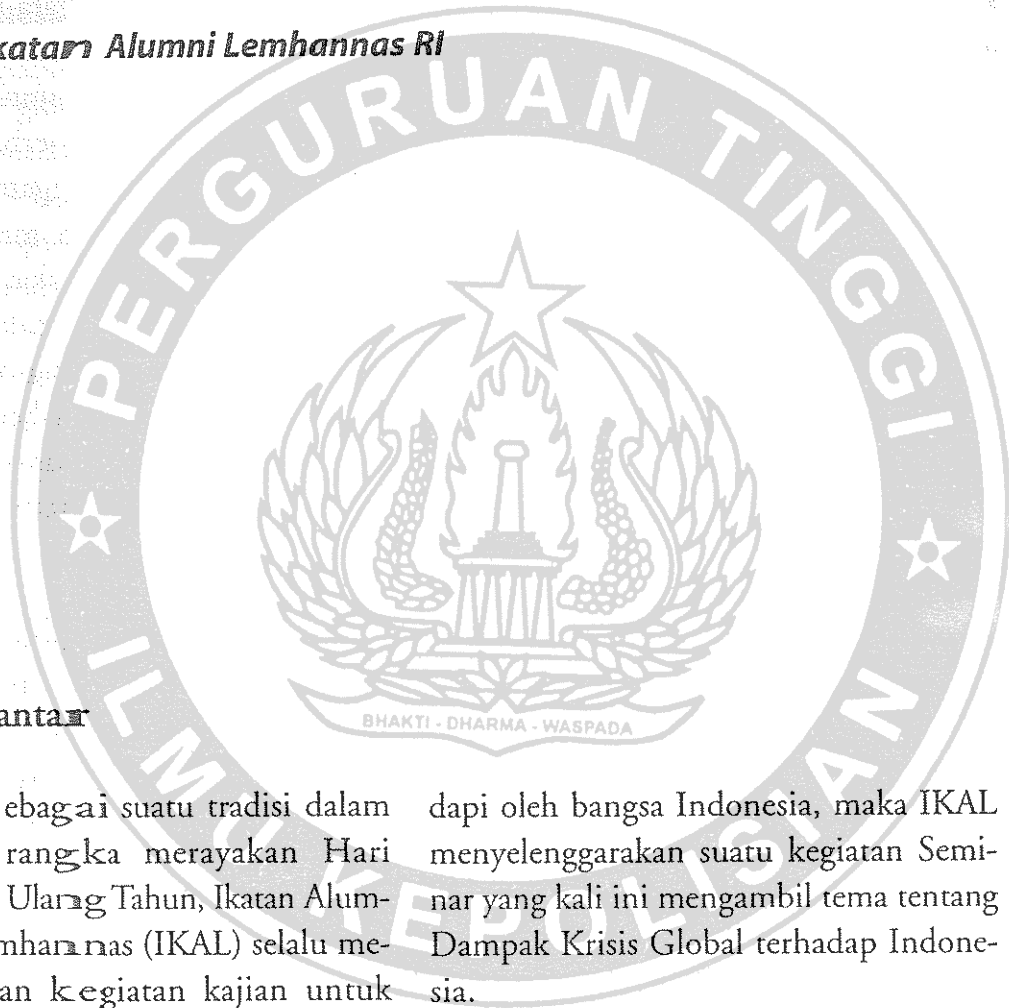


Dampak Krisis Global Terhadap Indonesia

Tim Ikatan Alumni Lemhannas RI



Pengantar

Sebagai suatu tradisi dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun, Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) selalu melakukan kegiatan kajian untuk membahas masalah strategik yang berlingkup nasional. Pada kesempatan memperingati Ulang Tahun ke-31 yang jatuh pada tanggal 17 Maret 2009, dan juga sebagai bentuk kepedulian IKAL kepada masalah pelik yang saat ini diha-

dapi oleh bangsa Indonesia, maka IKAL menyelenggarakan suatu kegiatan Seminar yang kali ini mengambil tema tentang Dampak Krisis Global terhadap Indonesia.

Krisis Ekonomi Global

Krisis global dipicu oleh krisis financial yang terjadi di Amerika Serikat yang berkaitan dengan kredit perumahan yang

Tantangan Ekonomi

Stimulus fiskal sifatnya hanya memitigasi dampak krisis sehingga tidak dapat diandalkan untuk menangkal gelombang krisis. Ketidak leluasaan stimulus fiskal disebabkan oleh terbatasnya penerimaan negara dan cadangan devisa nasional. Komplikasi dari defisit fiskal tidak hanya mengganggu stabilitas moneter tetapi juga menggerogoti cadangan devisa nasional dan *fiscal sustainability* terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang. Ruang manuver stimulus fiskal makin terbatas oleh amanat konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Untuk mencapai porsi tersebut, anggaran pendidikan pada APBN harus ditambah sebesar Rp. 46,1 triliun sehingga meningkatkan defisit sebesar Rp. 20,2 triliun. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan kontraksi, sampai perekonomian dunia berhasil bersama-sama keluar dari krisis.

Cadangan devisa nasional rentan terhadap aliran modal keluar (*capital flow*), dan pelarian modal (*capital flight*). Risiko *capital flight* yang di-

hadapi Indonesia tinggi karena tahun 2009 ini adalah tahun Pemilu yang rawan terjadi instabilitas sosial, politik, dan keamanan. Kerawanan sosial dan keamanan juga datang dari meluasnya PHK dan kemiskinan. Sampai saat ini upaya memperkuat posisi cadangan devisa terus dilakukan namun tidak mudah dan sangat mahal. Sumber devisa yang murah dan masih terbuka lebar bagi Indonesia adalah fasilitas yang disediakan oleh IMF dengan suku bunga sekitar 3-5%. Sebagai anggota, Indonesia berkewajiban untuk ikut berkontribusi dalam pengumpulan dana (*polling fund*) IMF. Dengan demikian Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lembaga tersebut berdasarkan kuota.

Perbankan nasional terus menghadapi tekanan sejak krisis ekonomi global mencuat pada kuartal terakhir tahun lalu. *Deleveraging, credit crunch* dan repatriasi USD ke negara asal mengakibatkan perbankan nasional sulit memperoleh fasilitas pinjaman dari pasar uang internasional. Pengetatan pemberian kredit membuat bank tidak berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi bahkan memperdalam kelesuan ekonomi. Pada gilirannya perekonomian yang lebih pa-

lan semakin mempersulit bank mengucurkan kredit karena risiko kredit macet yang meningkat. Berbagai kebijakan moneter dan perbankan telah ditempuh untuk memulihkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Namun sepanjang kegiatan sektor riil tetap lambat, sulit bagi bank menyalurkan kredit dan menanggung risiko kredit macet. Kondisi industri perbankan saat ini masih bisa bertahan terhadap dilema ini. Namun, seiring dengan berlanjutnya kelesuan, daya tahan industri perbankan secara pasti akan terus tergerus sehingga cepat atau lambat krisis perbankan tak terhindarkan.

KTG G-20 di London pada tanggal 2 April 2009 akan membahas 4 (empat) agenda. *Agenda pertama* adalah masalah stimulus fiskal. Mempertimbangkan kondisi fiskal yang masih lemah, maka Indonesia sebaiknya sepaham dengan Uni Eropa dan China yang berpendapat bahwa stimulus fiskal hendaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. *Agenda kedua* adalah regulasi dan supervisi yang lebih ketat terhadap sektor keuangan. Dalam menghadapi isu ini sebaiknya Indonesia mengambil posisi yang sama dengan AS yang menginginkan regulasi dan supervisi

disesuaikan dengan kondisi dan karakter sektor keuangan masing-masing negara. *Agenda ketiga* adalah reformasi IMF yang mencakup dua isu besar yaitu peningkatan dana yang dikelola oleh IMF dan reformasi IMF. Dalam hal ini sebaiknya Indonesia mengambil posisi untuk mendukung usulan bahwa penambahan dana dikaitkan dengan sistim kuota. Seandainya penambahan dana dikaitkan dengan kuota tidak berhasil diperjuangkan, maka posisi Indonesia sebaiknya dialihkan untuk mendukung usulan bahwa penambahan dana diperlakukan sebagai pinjaman. Mengenai reformasi IMF, Indonesia diharapkan berada pada posisi mendukung upaya mengurangi dominasi *voting power* yang dimiliki AS. *Agenda keempat* adalah isu mengenai proteksionisme di mana Indonesia sebagai anggota G-20, sebaiknya mengambil posisi menentang segala bentuk proteksionisme di bidang perdagangan barang dan jasa serta di sektor keuangan dan permodalan.

Tantangan Politik dan Pemerintahan

Terpeliharanya stabilitas merupakan tanggung jawab semua lembaga negara.

Namun demikian keseluruhannya bermuara pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab tersebut pasti tidak sederhana, apalagi di saat-saat yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu berikut segala hiruk pikuknya. Diperlukan situasi tenang agar program-program pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Pada saat yang sama, Presiden sangat perlu memenangkan kepercayaan publik, bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi dan memegang kendali penuh atas kabinet yang dipimpinnya. Presiden dan pemerintah yang dipimpinnya hanya mungkin dapat melaksanakan banyak program yang telah diletakkan apabila ada stabilitas, termasuk dan terutama dalam tubuh kabinet. Adalah penting, bahwa untuk memenangkan hati dan pikiran publik, Presiden menunjukkan bahwa kabinetnya solid. Hanya dalam kabinet yang solid dapat dirintis stabilitas pemerintahan, dan hanya dengan pemerintahan yang stabil dapat ditampilkan kebijakan yang konsisten.

Disamping itu, perlu pula dipertegas bahwa para pemimpin rakyat – baik partai politik maupun sektor non formal lainnya – juga harus ikut bertanggung jawab. Setidaknya, mereka

dapat membantu ikut memberi penjelasan yang menenangkan keadaan, dan tidak justru memanyakannya. Tujuannya, semata-mata untuk bersama-sama memelihara agar situasi tidak memanas, dan pada saat yang sama dapat selalu menjaga semangat kebersamaan dalam kehidupan bangsa. Harus ditekankan kepada para elit pimpinan, bahwa kegagalan dalam menghadapi kesulitan ini akan mendatangkan tantangan lain, yaitu meluasnya apatisme dikalangan masyarakat, dan meluasnya Golput. Proses demokrasi yang dibangun selama ini menjadi sangat mahal, dan bukan tidak mungkin akan menampilkan lagi tuntutan tentang perlunya penataan kembali sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara melalui amandemen UUD 1945.

Penegakan Hukum & Ketertiban Masyarakat menjadi penting untuk mendukung upaya penanggulangan krisis. Meluasnya PHK yang membawa akibat bertambah besarnya jumlah pengangguran, turunnya daya beli dan ancaman meningkatnya angka kemiskinan, bilamana tidak memperoleh pemecahan dalam kerangka waktu tertentu, hampir dapat dipastikan akan melahirkan masalah sosial yang lebih luas. Melebarnya kesenjangan

sosial juga memerlukan kewaspadaan, karena pada tingkat tertentu hal tersebut menampilkan potensi munculnya kerusuhan sosial. Kita memiliki pengalaman yang menyedihkan dalam hal yang terakhir ini, mengingat akibat yang ditimbulkan bukan sekedar kerugian ekonomi-finansial yang besar, tetapi juga renggangnya simpul-simpul perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan pengamanan terutama dalam pengelolaan program-program untuk menghadapi dan memulihkan akibat krisis, dan penegakan hukum terhadap gangguan dan penyimpangan atau penyelewengan program harus dilakukan dengan tegas dan tidak diskriminatif. Ditengah penilaian tentang semakin memprihatinkannya profesionalisme dan citra institusi serta aparat penegak hukum, rampilnya sebuah politik hukum yang lebih jelas untuk menegakkan hukum secara tegas dan tidak diskriminatif, merupakan tantangan yang besar.

Jaminan Keamanan Nasional di peroleh melalui keberadaan suatu rencana kontinjensi (*contingency plan*) yang memuat langkah-langkah pencegahan maupun penindakan apabila timbul gejala yang dinilai dapat membahayakan keamanan nasional. Untuk

itu, harus dapat di-identifikasi “kerawanan kritis” (*critical vulnerability*) yang berpotensi menjadi penyebab gangguan. Kemudian disusun “kebutuhan kritis” (*critical requirement*) yang harus disediakan. Selanjutnya harus dapat ditentukan “kemampuan kritis” (*critical capability*), yaitu kemampuan yang “harus” dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan jaminan keamanan nasional tersebut. Secara umum, kemampuan kritis dimaksud adalah ditegakkannya pilar-pilar Politik, Ekonomi dan Militer. Selanjutnya, diperlukan adanya “*crisis center*” yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rencana kontinjensi di atas. Semua itu dalam upaya terwujudnya daya tangkal dan rencana aksi (*deterrent and action plan*) untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional yang mencakup kepentingan keamanan (nasional) dan kepentingan kesejahteraan (nasional). Dalam perkembangannya, kini keamanan nasional cenderung terbagi menjadi keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia (*human security*).

Pertahanan Negara mempersyaratkan tegaknya pilar militer. Untuk itu, perlu dikaji kesiapan TNI saat ini da-

lam mengemban tugas Negara. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama tentang TNI yaitu *Pertama*, dalam suasana hajat demokrasi saat ini maka "netralitas" TNI menjadi bagian dari hiruk-pikuknya Pemilu. Intrik politik untuk menggoyahkan netralitas TNI berlangsung secara kasat mata. Hal ini bila tidak ditangani secara benar, akan dapat menurunkan soliditas TNI. *Kedua*, dalam tatanan prioritas pembiayaan belanja negara, telah berlangsung bertahun-tahun dimana anggaran TNI mendapatkan porsi yang jauh dari memadai. Hal ini tidak hanya berdampak kepada pembangunan kekuatan TNI dan gelarnya, namun yang lebih penting adalah tersendatnya upaya pembinaan profesionalisme prajurit TNI, yang pada gilirannya akan melemahkan jiwa nasionalisme dan semangat bela negara. *Ketiga*, rendahnya kemampuan TNI semakin membuka peluang terjadinya kegiatan pelanggaran wilayah yurisdiksi nasional maupun kegiatan-kegiatan pencurian sumber daya kelautan dan pembalakan hutan.

Saran IKAL

IKAL maupun seluruh bangsa Indo-

nesia mengharapkan bahwa langkah-langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI akan berhasil meredam gejolak krisis global maupun dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, mencermati perkembangan situasi nasional maupun global akhir-akhir ini, IKAL berpendapat bahwa perlu disiapkan langkah-langkah tambahan sebagai antisipasi sekiranya langkah-langkah terdahulu tidak dapat memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Langkah tambahan tersebut mencakup aspek ekonomi serta aspek politik dan pemerintahan.

Aspek Ekonomi

Pertama, langkah penyelamatan perbankan perlu sedini mungkin disiapkan, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman menangani krisis perbankan Indonesia pada tahun 1997/1998. *Stress Test* terhadap perbankan perlu dilakukan sedini mungkin sebelum krisis terjadi. Hasil *test* kemudian dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan seawal mungkin. Kiranya perlu diingat bahwa para penentu kebijakan dalam penyelamatan industri

perbankan tahun 1997/1998 ternyata terus dihadapkan kepada masalah hukum atas keabsahan keputusan yang diambil. Oleh karena itu RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang antara lain memberikan imunitas hukum kepada penentu kebijakan perlu segera disahkan.

Kedua, penentuan besarnya stimulus fiskal harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan *medium term fiscal sustainability* demi menjaga kepentingan generasi yang akan datang. Pengeluaran dalam rangka stimulus fiskal harus dilakukan dengan efektif, efisien dan menunjang peningkatan produktivitas perekonomian nasional. Kebijakan yang bersifat populis harus dihindari karena sifatnya manipulatif yang akan mengurangi *confidence*.

Ketiga, *Stress Test* perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan devisa menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Setelah diketahui *magnitude* devisa yang dibutuhkan, Pemerintah perlu bekerja keras mencari sumber dana yang tersedia, termasuk IMF. Mengenai kebijakan moneter sebaiknya lebih diarahkan untuk menjaga *interest rate differential* yang cukup menarik untuk menghambat aliran

modal keluar. Dengan demikian tugas menggerakkan kegiatan ekonomi lebih ditumpukan kepada kebijakan stimulus fiskal.

Keempat, untuk melindungi produk-produk dalam negeri lebih tepat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional agar barang-barang produksi dalam negeri lebih murah dan berdaya saing tinggi. Ekonomi biaya tinggi harus dipangkas agar diperoleh daya saing yang benar-benar otentik.

Kelima, Indonesia sedini mungkin harus menyusun *Exit Strategy*, termasuk *time-frame*, atas semua kebijakan penanggulangan krisis agar pelaku-pelaku ekonomi *confidence* terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah panjang.

Aspek Politik dan Pemerintahan

Pertama, aparat penegak hukum sudah waktunya menampilkan citra moral budaya yang lebih profesional, agar dapat dicegah lahirnya aksi hakim jalanan yang bereskalasi berupa tindak teror. Harus dicegah pemanfaatan peluang tatkala politik sedang tidak

stabil, agar penegakan hukum menjadi motor penggerak proses demokratisasi.

Kedua, dalam hal menjaga soliditas Kabinet, Presiden perlu dengan tegas menekankan kepada para Menteri agar meningkatkan koordinasi antar Departemennya, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan upaya penanggulangan krisis saat ini. Disamping itu, untuk menjaga ketenangan masyarakat luas, maka Presiden, selaku Kepala Negara, perlu memanggil, mengajak bicara, dan minta para elit pimpinan partai politik untuk bersama-sama memberi pemahaman kepada rakyat tentang berbagai kesulitan serta langkah-langkah yang telah dan masih perlu diambil untuk menghadapinya. Secara terbuka Presiden dapat meminta para Pemimpin Parpol untuk mengajak jajaran partai masing-masing, agar bersikap menahan diri atau menggunakan secara terukur berbagai kesulitan yang timbul akibat krisis sebagai isu dalam kampanye pilleg dan pilpres.

Ketiga, TNI harus diupayakan untuk tetap solid dan tidak terjebak pada intrik politik dan minimnya anggaran yang tersedia.

Demikianlah beberapa sumbangan pemikiran IKAL berkaitan dengan krisis yang melanda Indonesia saat ini, yang disampaikan dengan harapan agar bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya, harus waspada dan tanggap terhadap perubahan paradigma yang sedang berlangsung, dengan menciptakan kemampuan membuat "scenario building" agar tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Di samping itu, bangsa Indonesia seluruhnya harus berubah dan berhenti dari euforia reformasi yang kebablasan serta tetap menjaga citra budaya bangsa yang sesuai dengan harkat dan martabat nilai-nilai luhur.

Sumbang pikir ini merupakan bentuk kepedulian IKAL terhadap kondisi bangsa dan Negara serta sebagai wujud jatidiri IKAL sebagai wadah para alumni Lemhannas yang mengikat komitmen untuk senantiasa mendharmabaktikan kemampuan olah pikirnya demi kejayaan bangsa dan negara tercinta.

Semoga apa yang disampaikan IKAL dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perumusan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi krisis yang sedang berlangsung. □